



PERDAGANGAN MANUSIA DAN PEMBANGUNAN: PROBLEM TATA KELOLA
NEGARA-SENTRIS DAN KERENTANAN MASYARAKAT PERBATASAN
INDONESIA-TIMOR LESTE

Amalia Nurul Hutami
19/449121/PSP/06668

ABSTRAK

Tesis ini menjelaskan problem perdagangan manusia dalam konteks pembangunan dan migrasi, khususnya dengan lebih menitikberatkan pada aspek pembangunan manusia di wilayah perbatasan. Melalui metode kualitatif dengan pengumpulan data primer dan sekunder, penelitian ini menemukan bahwa tata kelola perbatasan berbasis negara-sentris dengan pendekatan *hard-border* di perbatasan Indonesia-Timor Leste, Kabupaten Belu, telah berkontribusi pada tertinggalnya pembangunan manusia di wilayah tersebut. Rendahnya modal manusia (*human capital*) membuat masyarakat tidak mampu membangun wilayahnya sendiri dan lebih terdorong untuk menerima tawaran migrasi internasional secara non-prosedural untuk memperbaiki taraf hidup—yang tidak jarang malah berakhir menjadi korban perdagangan manusia, secara sadar maupun tidak sadar. Meninjau ulang pendekatan tata kelola perbatasan negara-sentris yang diterapkan, penelitian ini menekankan perlunya perancangan ulang tata kelola perbatasan Indonesia-Timor Leste dengan mengurangi dominasi model pendekatan *hard-border* yang selama ini direpresentasikan oleh kebutuhan serta kekuatan militer di perbatasan, dan lebih difokuskan pada aspek pengembangan kualitas sumber daya manusia melalui kolaborasi dan pengarusutamaan pendekatan *soft-border* dalam tata kelola perbatasan.

Kata Kunci: Tata kelola perbatasan; keamanan manusia; pembangunan manusia; perdagangan manusia.



HUMAN TRAFFICKING AND DEVELOPMENT: STATE-CENTRIC BORDER

**GOVERNANCE AND THE VULNERABILITY OF POPULATION IN INDONESIA-
TIMOR LESTE BORDER**

Amalia Nurul Hutami
19/449121/PSP/06668

ABSTRACT

This thesis discusses human trafficking problema in the context of development and migration, specifically by focusing more on the aspect of human development in border areas. Using qualitative methods with primary and secondary data collection, this study found that the state-centric border governance with a hard-border approach at the Indonesia-Timor Leste border, Belu Regency, has contributed to the human development crisis in the region. The low level of human capital makes people unable to develop their own territory and are more motivated to accept offers of non-procedural international migration in order to improve their standard of living—which often ends up becoming victims of human trafficking. Reviewing the current state-centric border governance approach, this study emphasizes the need of redesigning Indonesia-Timor Leste border governance by reducing the dominance of the hard-border approach model which has been represented by military power and its facilities at the border. Furthermore, this thesis suggest that it is important to focus more on designing a long-term strategy that puts the human development a prioritize through the collaboration and the mainstreaming of soft-border approaches in the current border governance.

Keywords: border governance; human security; human development; human trafficking.